

Konstruksi Identitas dalam Kepentingan Maritim Tiongkok terkait Peningkatan Kekuatan *People Liberation Army Navy* (PLA Navy)

Angga Nurdin Rachmat¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia
angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

ABSTRAK

Modernisasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dengan menitikberatkan pada matra Angkatan Laut (*People Liberation Army Navy*/ PLA Navy). Modernisasi yang dilakukan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas namun juga kualitas melalui serangkaian akuisisi dan pembangunan kapal perang, kapal selam hingga kapal induk. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok saat ini memiliki perhatian lebih pada wilayah maritim dengan ambisi membangun Angkatan Laut yang tangguh dan modern. Meskipun jika dilihat secara geografis Tiongkok merupakan negara kontinental yang seharusnya menitikberatkan pada kemampuan matra darat, namun saat ini terjadi perubahan dalam orientasi pertahanan negara ini. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya Tiongkok mengubah identitas negaranya dari negara kontinental menjadi negara maritim. Beranjak dari perubahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai konstruksi identitas maritim dari Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka memperkuat kepentingan terhadap wilayah maritim. Konstruksi identitas Tiongkok dapat ditemukan pada evolusi dari doktrin dan perkembangan armada yang dimiliki oleh PLA Navy yang memiliki keterkaitan dengan munculnya kepentingan maritim diantaranya sebagai upaya *balancing* terhadap Amerika Serikat di Pasifik, mengamankan jalur distribusi energi serta menjaga integritas teritorial.

Kata-kata Kunci: Tiongkok, Maritim, Identitas, Kepentingan, PLA Navy

ABSTRACT

China military modernization has been showing significant development with focused on its Navy. The modernization was not only about quantity but also at quality of the fleet by developing and the acquisition of warship, submarine and aircraft carrier. This phenomenon shows that China at recent time give more focus in maritime domain with its ambition to build the strong and modern Navy. Although China is continental state but it doesn't meant take more focus on land base defence system, recently it make a significant shift at defence orientation. The shift related as China effort to shift it identity from continental to maritime state. This article will discuss identity construction from China to stress the interest at maritime domain. Identity construction of China can we find on its doctrine evolution and the development of PLA Navy fleet which is related to the emerging of maritime interest such as rebalancing US naval power in pacific, to secure energy distribution line and to ensure its teritorial integrity.

Keywords: Tiongkok, Maritime, Identity, Interest, PLA Navy.

Pendahuluan

Dalam beberapa dasawarsa terakhir dunia seakan tersentak dengan perubahan yang ditunjukkan oleh negara Tirai Bambu yang telah sekian lama menutup dirinya dari dunia luar. Bagaikan sebuah metamorfosis sempurna, Tiongkok saat ini muncul sebagai sebuah kekuatan dalam bidang ekonomi dan militer. Terminologi metamorfosis ini merujuk kepada tertutupnya Tiongkok selama ini yang kemudian tiba-tiba muncul dengan berbagai pencapaian yang luar biasa. Salah satu pencapaian tersebut adalah dalam bidang militer dimana saat ini negara tersebut mulai menunjukkan berbagai pencapaian dalam teknologi persenjataan untuk mendukung angkatan bersenjata yakni *People Liberation Army* (PLA). Pencapaian ini terlihat jelas pada akuisisi teknologi persenjataan yang diterapkan pada *PLA Air Force* (Angkatan Udara) dan *PLA Navy* (Angkatan Laut) dengan memodernisasi dan mengembangkan berbagai persenjataan terbaru sebagai hasil dari produksi dalam negerinya. Tiongkok yang sejatinya secara geografis merupakan negara daratan atau kontinental saat ini merubah orientasinya menjadi negara maritim. Perubahan orientasi ini ditunjukkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh negara ini terhadap kekuatan Angkatan Laut (*People Liberation Army Navy/PLA Navy*).

Perubahan orientasi yang disertai dengan pembangunan kekuatan negara ini di laut menjadi salah satu fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, bukan hanya dari segi pencapaian maupun dampak yang ditimbulkan, namun juga latar belakang dari perubahan orientasi tersebut.. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana konstruksi dan penguatan identitas maritim terkait dengan kepentingan yang merupakan dasar bagi Tiongkok untuk kemudian mengembangkan potensi kekuatan maritimnya meskipun secara geografis bukan negara

maritim. Analisis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan konstruktivis dalam melihat bagaimana terbentuknya konstruksi dari identitas dan kepentingan yang melatarbelakangi perubahan orientasi pertahanan Tiongkok dari kekuatan daratan/ kontinental kepada kekuatan maritim.

Konstruksi Identitas Maritim Tiongkok

Akar maritim Tiongkok dapat dilihat pada masa Dinasti Ming dimana Laksamana Zheng He telah menunjukkan bagaimana kehebatan dari armada kapal mereka untuk melakukan berbagai perjalanan di Samudera Hindia untuk menjaga stabilitas perdagangan dengan menggunakan kekuatan laut.¹ Perjalanan Laksamana Zheng antara tahun 1405-1433 ke Asia Tenggara dan Samudera Hindia merupakan membawa misi perdagangan, diplomasi dan persahabatan. Dalam perjalanannya Jenderal Zheng membawa rombongan besar kapal yang jauh lebih besar baik secara jumlah maupun teknologi dari bangsa Spanyol dan Portugis pada masa tersebut.² Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa pada masa tersebut, Tiongkok menjadi sebuah kekuatan maritim yang dominan. Kekuatan maritim Tiongkok juga terlihat dari bagaimana jalur pelayaran yang digunakan sebagai rute perdagangan dari negara tersebut hingga ke Teluk Persia.

Penguatan identitas Tiongkok sebagai negara maritim dilihat dalam kacamata konstruktivisme menjadi dasar bagi terbentuknya kepentingan, dimana hal ini yang akan menentukan bagaimana negara berinteraksi

¹ Eric A MacVadon. PLA Navy as an Instrument of Statescraft dalam Philip C. Saunders. *The Chinese Navy Expanding Capabilities, Evolving Roles* (pp. 251). Washington DC: George Washington University Press. 2011.

² Naval Intelligence. *The People Liberation Army Navy : A Modern Navy With Chinese Characteristic* (pp. 3) Suitland : The Office of Naval Intelligence. 2009.

satu sama lain.³ Konstruktivisme didalam tulisan ini akan digunakan untuk menganalisa kerjasama maupun pola interaksi yang ada dalam struktur sosial dari Tiongkok dimana akan tercermin dari perilaku yang didasarkan atas identitas dan kepentingan.⁴ Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya perubahan identitas yang dialami oleh Tiongkok yang dalam sejarah pernah menjadi negara maritim yang tangguh kemudian berubah menjadi negara kontinental dan saat ini kembali kepada identitas maritim.

Secara geografis Tiongkok merupakan negara yang wilayahnya didominasi daratan, namun sejarah kemaritiman negara ini tidak dapat dikesampingkan. Meskipun pada akhirnya tradisi maritim Tiongkok mulai meredup pada masa Dinasti Qing, dimana kekuatan maritim Tiongkok mulai tergeser akibat kekalahan dalam perang melawan Jepang pada 1894-1895 serta munculnya kekuatan armada laut negara-negara Barat. Kondisi ini kemudian memaksa Tiongkok untuk lebih mengedepankan identitas kontinental yang tercermin dalam kehidupan agraris masyarakatnya. Dengan demikian, Tiongkok lebih mengoptimalkan potensi wilayah daratan serta masyarakatnya dalam pembangunan ekonomi, politik dan pertahanan. Konsekuensinya adalah mulai mudarnya identitas maritim Tiongkok yang sebenarnya telah memiliki akar yang kuat.

Menyadari akan sejarah maritim tersebut setelah terbentuknya Tiongkok modern dibawah pemerintahan Mao Ze Dong, Tiongkok mulai kembali membangun kejayaan kekuatan maritimnya.. Kesadaran akan kekuatan maritim tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan interaksi dengan negara-negara khususnya terkait dengan dorongan peningkatan ekonomi global, dimana Tiongkok mulai aktif untuk

meningkatkan hubungan ekonomi secara erat seiring dengan peningkatan industrialialisasi serta keinginan dari negara ini untuk memainkan peran yang signifikan dalam politik internasional dan regional.⁵ Industrialisasi yang dilakukan oleh Tiongkok secara otomatis mengubah pola masyarakat agraris yang dominan pada identitas kontinental. Perubahan interaksi tersebut berdampak kepada perubahan dalam identitas yang dimiliki oleh Tiongkok yang kembali dominan kepada identitas maritimnya.

Oleh karena itu, penekanan terhadap kepentingan yang kemudian diusung oleh sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari identitas yang melekat pada negara tersebut. Kesadaran akan identitas yang dimiliki tergambar dalam bentuk kebijakan sebagai sebuah tindakan yang diambil untuk mencapai kepentingan Identitas maritim yang diperkuat kembali oleh Tiongkok ditujukan untuk mendukung pilar negara yang dikembangkan oleh Partai Komunis Tiongkok (*Chinese Communist Party/CCP*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pilar tersebut antara lain perkembangan ekonomi dan integritas nasional.⁶ Pembangunan kekuatan maritim melalui modernisasi *PLA Navy* memainkan peranan dalam mempertahankan kepentingan nasional dan meningkatkan prestise, power dan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana upaya yang saat ini dilakukan oleh Tiongkok dalam memperkuat identitas negara mereka sebagai negara maritim dengan berbagai doktrin pertahanan laut yang didukung oleh pembangunan *PLA Navy* sebagai angkatan laut yang tangguh dan modern.

³ Alexander Wendt. Anarchy is What States Make of it: Social Construct of Power Politics. *International Organization* 46, 2, pp. 398. 1992.

⁴ Ibid, pp. 417.

⁵ Lihat pada Kun-Chin Lin dan Anders Villar Gertner. *Maritime Security in the Asia Pacific : China and the Emerging in the East and South China Seas*. London: Chatam House. 2015.

⁶Naval Intelligence. *The People Liberation Army Navy : A Modern Navy With Chinese Characteristics* (pp. 4).

Evolusi Doktrin Pertahanan Laut Tiongkok

Dengan merujuk pada fakta tersebut, terlihat bahwa Tiongkok yang secara geografis merupakan negara daratan berupaya untuk membangkitkan dan memperkuat identitas kemaritiman mereka yang dahulu pernah dimiliki. Hal ini terimplementasi secara jelas dalam perubahan doktrin pertahanan maritim Tiongkok dari waktu ke waktu. Pada awal terbentuknya sebagai negara, Tiongkok menerapkan pertahanan yang berbasis *near coast defence*, lalu pada era tahun 1980 *near-seas active defence* lalu pada awal millennium baru berubah menjadi *far seas operation*.⁷ *Near coast defence* merujuk kepada sebuah sistem pertahanan dimana kekuatan pertahanan akan digelar pada beberapa belas *nautical mil* dari zona laut tambahan terhadap garis pantai dan wilayah teritorial Tiongkok yang terbentang 300 km dari daratan utama ke garis pantai, dimana area tersebut merupakan wilayah kota yang penting secara politik dan ekonomi .

Near Seas Active Defence merupakan konsep yang dikemukakan oleh Deng Xiaoping, dimana bila dibandingkan dengan strategi sebelumnya, strategi ini mencakup upaya secara aktif untuk bertahan di wilayah lautan yang dekat dengan garis pantai. Perbedaan yang kemudian muncul dengan strategi *Near Coast Defence* adalah bagaimana strategi ini mencakup wilayah pertahanan laut yang lebih luas dan memerlukan kemampuan angkatan laut yang besar pula. Dalam strategi ini cakupan pertahanan yang dilakukan adalah dengan mengamankan garis pulau yang terbentang dari Kepulauan Kurile hingga Kepulauan Jepang, Kepulauan Ryukyu, Taiwan, Filipina hingga Kalimantan, 2) Laut Kuning, Laut Tiongkok Timur, Laut Tiongkok Selatan, 3) cekungan pada lingkaran luar kepulauan dan yang berada di

utara pasifik. Disisi lain, konsep ini tidak mencakup Pasifik Selatan dan Samudera Hindia. Dalam pemahaman secara geografis, terminologi *Near Seas* merujuk kepada pengertian tradisional yang lebih luas dimana mencakup wilayah tambahan 200 mil laut ke arah laut dari daratan Tiongkok. Sementara strategi *Far Seas* yang sedang dicanangkan oleh Tiongkok merujuk kepada strategi pertahanan laut dengan cakupan yang lebih luas hingga dapat mencakup Kepulauan Guam, strategi ini merujuk kepada upaya Tiongkok untuk mencapai predikat sebagai *Blue Waters Navy*. Strategi ini yang kemudian sedang dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi persenjataan yang dimiliki oleh PLA Navy. Hal ini memungkinkan PLA Navy beroperasi lebih jauh dengan menggunakan gugus tempur lengkap untuk mengamankan wilayah seluas 1000 mil laut dari laut teritorialnya.

Pembangunan Kekuatan Armada PLA Navy

Upaya untuk memperkuat identitas sebagai negara maritim ini kemudian dilakukan oleh Tiongkok dengan membangun kekuatan angkatan lautnya *PLA Navy*. Pembangunan kekuatan *PLA Navy* sebagai sebuah kekuatan maritim modern merupakan konstruksi pemikiran dari Mao Ze Dong setelah revolusi yang terjadi di negara tersebut. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian dari *PLA Navy* saat ini merupakan implementasi dari ide Mao Ze Dong pasca revolusi di Tiongkok, dengan bantuan dari Uni Soviet yang menjadi sekutu utamanya untuk menysuplai berbagai persenjataan bagi Angkatan Lautnya. Pada awal terbentuknya *PLA Navy* mendatangkan seluruh perlengkapan dan teknologi dari Uni Soviet saat pertama kali dibentuk dan kemudian berhasil mengembangkan serta membuat sendiri berbagai perlengkapan tersebut dalam waktu yang singkat. Demikian pula dalam pembuatan kapal yang pada awalnya dibantu sepenuhnya oleh Uni Soviet, kemudian Tiongkok meniru desain yang

⁷ Li Na. The Evaluation of China's Naval Strategy and Capabilities: From "Near Coast" and "Near Seas" to "Far Seas". *Asia Security* 5, 2, pp. 144. 2009.

diberikan oleh Uni Soviet secara mandiri dan pada akhirnya Tiongkok mampu membuat kapal produksi sendiri.⁸

Kemampuan dari Tiongkok untuk mengadaptasi dan kemudian memproduksi sendiri kapal maupun berbagai perlengkapan pendukung serta persenjataan menjadi modal bagi negara ini untuk secara leluasa mengembangkan postur *PLA Navy* baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini tentu saja akan mendukung bagaimana pelaksanaan serta evolusi dari doktrin pertahanan laut yang dimiliki. Hal ini terlihat saat ini dimana modernisasi yang dilakukan terhadap *PLA Navy* menitikberatkan kepada akuisisi program persenjataan, yang didalamnya termasuk program untuk mengembangkan rudal balistik anti-kapal (*Anti-ship Ballistic Missile/ ASBMs*), rudal jelajah anti-kapal (*Anti Ship Cruiser Missile/ASCMs*) rudal jelajah untuk target didarat (*Land-attack Cruise Missiles/ LACMs*), rudal permukaan ke udara (*Surface To Air Missile/SAM*), ranjau, pesawat berawak, pesawat tanpa awak, kapal selam, kapal induk, kapal perusak, kapal fregat, kapal patrol, kapal pendarat amfibi, kapal penyapu ranjau, kapal medis dan kapal pendukung.⁹

Program tersebut telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dimana saat ini *PLA Navy* telah secara resmi mengoperasikan kapal induk (*Aircraft Carrier*). Tiongkok berhasil membangun kembali Kapal Induk kelas *Varyag* bekas Uni Soviet yang kemudian diberinama *Liaoning*, meskipun keberadaan dari kapal induk dalam era modern bukan sesuatu yang baru, namun bagi Tiongkok hal ini merupakan pencapaian terutama bagi *PLA*

Navy. Hal ini merupakan sebuah simbolisasi bahwa *PLA Navy* telah naik ke ranking tertinggi dalam jajaran Angkatan Laut dunia.¹⁰ Tidak puas hanya memiliki satu kapal induk, *PLA Navy* berencana akan membangun kapal induk kedua untuk memperkuat posisi mereka dalam penguasaan wilayah laut. Demikian pula dengan kepemilikan kapal selam nuklir, dimana Tiongkok telah memiliki kapal selam kelas *Jin* dan Kelas *Shang*. Hal ini didukung dengan berbagai kapal perang, serta keberhasilan dari *PLA Navy* untuk mengoperasikan pesawat tempur *J-15* dari kapal induk. Melihat realitas tersebut maka strategi *far seas* yang kemudian dianut oleh *PLA Navy* akan semakin mudah untuk dijalankan mengingat kemampuan daya jangkau dari gugus tempurnya dapat mencakup wilayah yang cukup jauh.

Kepentingan Tiongkok Atas Kekuatan Maritim

Penguatan identitas maritim yang kemudian dilakukan oleh Tiongkok, secara otomatis akan membuat negara ini harus mengejar kepentingan terkait dengan identitas yang terbangun tersebut. Identitas yang kemudian tuangkan dalam ide strategi pertahanan dari *near seas* kepada *far seas* yang termaterialisasikan dalam pembangunan kekuatan angkatan laut *PLA Navy* yang besar dan modern tidak dapat dilepaskan dari kepentingan yang muncul di kawasan maritim. Kepentingan tersebut terkait dengan usaha mengimbangi hegemoni Amerika Serikat di Pasifik, kebutuhan akan sumber energi dan upaya menjaga kedaulatan wilayahnya.

Mengimbangi Hegemoni Amerika Serikat di Pasifik

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan wilayah Pasifik menjadi salah

⁸ Sandeep Dewan. *China Maritime Ambitions and the PLA Navy* (pp. 16). New Delhi: Vij Books. 2013.

⁹ Ronald O'Rourke. *China Naval Modernization: Implication fo U.S Navy Capabilities-Background and Issues for Congres* (pp. 3) Washington DC: Congres Research Service. 2012.

¹⁰ Felix K Chang. *Making Waves: Debates Behind China's First Aircraft Carrier* (pp. 1). Foreign Policy Research Institute. 2010.

wilayah yang sangat penting dalam konstelasi keamanan maupun ekonomi dunia. Eric Grove menyebutkan bahwa terdapat dua kekuatan Angkatan independen di Asia Pasifik yakni AS dan Rusia.¹¹ Meskipun pada kenyataannya AS menjadi kekuatan yang mendominasi terkait dengan keberadaan dari kekuatan Angkatan Laut Rusia yang saat ini hanya berfokus pada pertahanan wilayah perairannya sendiri. Dominasi Angkatan Laut AS di Pasifik adalah dengan menjadikan Pasifik sebagai wilayah pertahanan mereka dengan menempatkan gugus tempur angkatan laut mereka yakni 7th Fleet (Armada Ke-Tujuh) dibawah *United States Pacific Command* (USPACOM). Meskipun kemudian AS berkonsentrasi di Front Barat yakni Eropa dan Timur Tengah, namun keberadaan dari USPACOM tersebut tetap menjadi salah satu kekuatan hegemoni di Asia Pasifik. Pada tahun 2011 pemerintahan Presiden Barrack Obama mulai mengeluarkan beberapa kebijakan yang menunjukkan upaya negara tersebut untuk semakin memperluas dan mengintensifkan perannya di wilayah Asia Pasifik.¹²

Implementasi dari upaya perluasan dan penguatan peran AS salah satunya adalah dengan menempatkan pasukan marinirnya di Australia, meskipun kemudian AS berkilah bahwa pasukan marinir ini diharapkan akan bertindak cepat atas masalah-masalah kemanusiaan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Untuk mendukung hal tersebut kekuatan dari militer AS ini dilengkapi dengan *Joint Defence Facility* sebagai fasilitas yang memiliki kemampuan melakukan aksi pengumpulan data intelijen di *Pine Gap* dekat

¹¹ Eric Grove. Sea Power in the Asia-Pacific Region dalam Prabhakar W Lawrence et. all (ed). *The Evolving Maritime Balance of Power in the Asia Pacific* (pp. 21). Singapura: Institute of Defence and Strategic Studies. 2006.

¹² Robert G. Sutter, et.al. *Balancing Acts: The US Rebalance and Asia-Pacific Stability*, (pp. 1) Washington DC: George Washington University. 2013.

Alice Springs.¹³ Tetapi keberadaan pasukan tersebut dianggap sebagai sebuah pertanda bahwa AS siap untuk terjun mengamankan dominasinya di wilayah tersebut. Keberadaan marinir AS di Australia seakan melengkapi strategi untuk membentengi wilayah Pasifik karena di Utara AS memiliki pangkalan di Okinawa dan di tengah-tengah wilayah pasifik AS memiliki pangkalan di Guam dan Hawaii. Fenomena tersebut seakan menjadi pembuktian bahwa selama ini AS memiliki kepentingan untuk mendominasi wilayah Pasifik dan menginginkan untuk terus menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Dominasi tersebut tentu saja harus menitikberatkan kepada kekuatan laut mengingat wilayah Pasifik merupakan lautan yang memisahkan tiga benua.

Tiongkok melihat bahwa dominasi AS di Pasifik menjadi hambatan bagi upaya negara tersebut dalam melaksanakan strategi pertahanan maupun upaya pencapaian kepentingan nasionalnya di laut. Dengan kekuatan Angkatan Laut AS yang besar, pilihan rasional bagi Tiongkok adalah mengimbangi dengan membangun kekuatan yang setara. Keinginan untuk mengimbangi dominasi AS memang bukan hal yang mudah, namun, bukan pula suatu hal yang mustahil. Sebagai upaya untuk merealisasikan hal tersebut Tiongkok telah mengalokasikan anggaran pertahanan yang sangat besar dalam rangka melakukan akuisisi persenjataan serta riset yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan persenjataan yang dimilikinya. Hasil dari upaya tersebut diantaranya adalah pesawat tempur J-10, kapal selam berkemampuan nuklir serta kapal perang yang dilengkapi dengan rudal anti-kapal. Dalam rangka memperkuat armada tempur laut Tiongkok telah memiliki satu kapal induk, pengembangan pesawat dengan kemampuan

¹³ Poltak Partogi Nainggolan. Perkembangan Strategi Militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. *Info Singkat Hubungan Internasional IV*, 02, pp. 5-8. 2012.

stealth serta rudal anti satelit. Ambisi Tiongkok dalam pengembangan gugus tempur kembali dilakukan dengan pengembangan kapal induk kedua sebagai indikator bahwa negara tersebut tengah mengembangkan kekuatan maritimnya.¹⁴ Bila Tiongkok berhasil melakukan hal tersebut dengan adanya armada kapal induk, hal ini merupakan pencapaian besar dalam meningkatkan kekuatan militer Tiongkok. Konsekuensinya adalah akan terjadi perubahan besar dalam perimbangan kekuatan di Asia-Pasifik¹⁵, dimana selama ini AS menjadi negara hegemoni. Perbandingan dari kekuatan kedua Angkatan Laut AS dan Tiongkok dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Perbandingan Kekuatan Armada Laut US Navy dan PLA Navy

	US Navy	PLA Navy
Aircraft Carrier	20	1
Frigates	10	50
Destroyer	65	29
Cruiser	0	0
Corvette	0	39
Submarine	66	73
Patrol Vessel	13	220
Mine Warfare	11	29

Sumber : Diolah oleh Penulis dari globalfirepower.com

¹⁴ Lisbet. Peningkatan Kekuatan Militer China. *Info Singkat Hubungan Internasional I*, 05, pp. 6. 2012.

¹⁵ Richard A. Bitzinger dan Paul T. Mitchell. China New Aircraft Carrier: Shape of Thing to Come 74, 6, pp. 2. 2011.

Perubahan konstelasi kekuatan Angkatan Laut di Asia Pasifik semakin jelas terlihat saat Tiongkok menunjukkan keberhasilan dari percobaan pelayaran Kapal Induknya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Tiongkok tengah membangun “*power projection*” di wilayah Asia Pasifik. Dimana Tiongkok akan memiliki kapabilitas dalam rangka memobilisasi kekuatan untuk menggertak atau melakukan tindakan koersif yang signifikan yang selama ini di monopoli oleh Angkatan Laut AS. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Angkatan Laut Tiongkok, maka harapan minimal yang ingin dicapai adalah perimbangan kekuatan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah kondisi “*status quo*” di wilayah pasifik. Dengan kondisi ini maka diharapkan mampu mengunci mobilitas dari angkatan laut AS yang selama ini dianggap senantiasa melakukan provokasi dan memberikan dukungan terhadap negara yang memiliki sengketa dengan Tiongkok seperti Taiwan dan Jepang, bahkan di Laut Tiongkok Selatan. Kekhawatiran Tiongkok tersebut diperkuat dengan penguatan kerjasama aliansi Jepang dan AS sebagai sebuah langkah untuk menahan laju dan kebangkitan Tiongkok. Merespon hal tersebut maka dalam buku putih pertahanannya negara tersebut meninjau ulang konsep pertahanan yang akan diimplementasikan oleh negaranya.¹⁶ Peninjauan tersebut tentu saja memiliki dampak terhadap implementasi pada tataran strategis maupun teknis, sehingga urgensi dalam penguatan identitas maritim yang terimplementasikan dalam penguatan *PLA Navy* menjadi sebuah hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Mengamankan Jalur Distribusi Energi dan Perdagangan

Sebagai sebuah negara yang tengah memacu pertumbuhan ekonomi melalui industri,

¹⁶ Adi Joko Purwanto, Peningkatan Anggaran Militer Tiongkok dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur, *Spektrum*, 7. No. 1. 10. 2010.

Tiongkok memerlukan sumber energi untuk menyokong laju industri tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari *International Energy Agency*, permintaan minyak oleh Tiongkok meningkat dari 2,3 juta barel perhari pada tahun 1989 menjadi 5,5 juta barel perhari pada tahun 2003. Permintaan minyak ini meningkat menjadi 7,15 juta barel perhari pada 2006 dan diperkirakan akan mencapai 13,5 juta barel perhari pada 2030¹⁷. Dengan kebutuhan yang demikian besar, Tiongkok tidak dapat mengandalkan produksi energi dalam negeri, sehingga pilihannya adalah dengan melakukan impor dari negara lain. Permasalahan yang kemudian melingkupi Tiongkok adalah bagaimana distribusi energi yang berasal dari luar negaranya dapat tiba dengan selamat dan tanpa gangguan. Sebagian besar jalur distribusi energi ini diangkut melalui jalur laut, Tiongkok menyadari bahwa ancaman terhadap jalur distribusi energi merupakan ancaman bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara.

Berkaitan dengan kepentingan terhadap keamanan jalur distribusi tersebut, maka Tiongkok mau tidak mau harus mengembangkan sebuah instrumen Angkatan Laut yang dapat menghadapi berbagai tantangan serta ancaman yang dapat mengganggu keamanan distribusi energi mereka. Strategi *far seas* yang dijalankan dan didukung dengan kekuatan *PLANavy* yang kuat memungkinkan negara ini menguasai jalur-jalur untuk memastikan bahwa pasokan energinya tidak terganggu. Meskipun, upaya untuk mampu mengontrol jalur laut untuk distribusi sumber energi yang dilakukan oleh kekuatan angkatan laut Tiongkok ini dapat menjadi ancaman terhadap kapal lain, sehingga menciptakan instabilitas terhadap keselamatan kapal pada jalur tersebut. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Tiongkok bertujuan tidak hanya

¹⁷ Arthur S. Ding, China's Energy Security Demands and the East China Sea : A Growing Likelihood of Conflict in East Asia?, *The China and Eurasia Forum Quarterly*, 3. No. 3. 35. 2005.

untuk membangun angkatan laut dengan kelas *blue-water* sebagai jalan untuk mengontrol jalur laut, tetapi akan digunakan pula untuk kepentingan mengamankan aktivitas eksplorasi dasar laut serta mengembangkan kemampuan rudal dalam rangka menangkal potensi gangguan terhadap distribusi energi dari ancaman tradisional yang berpotensi muncul dari Angkatan Laut negara lain termasuk AL AS, terutama dalam kasus konflik dengan Taiwan¹⁸, serta ancaman non-tradisional seperti perompakan, terorisme maritim dan lain sebagainya. Kemungkinan ini senantiasa muncul terkait dengan persaingan antara AS dan Tiongkok serta permasalahan konflik dengan Taiwan, dimana jalur distribusi energi Tiongkok harus melewati wilayah Taiwan.

Tiongkok sebagai sebuah negara yang saat ini berbasis industri memiliki perhatian besar terhadap jalur perdagangan yang menjadi urat nadi untuk menjamin kelangsungan proses industri. Sebagian besar jalur distribusi atau perdagangan dunia dilakukan melalui wilayah laut. Rute jalur perdagangan dan energi Tiongkok telah berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi Tiongkok dengan memperluas ke wilayah Samudera Hindia. Kondisi ini mengharuskan Tiongkok memposisikan wilayah yang menjadi distribusi tersebut harus dipastikan bebas dari berbagai gangguan untuk menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi negara tersebut. Pandangan Tiongkok ini tidak dapat dilepaskan dari pernyataan A.T Mahan bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan sebuah negara harus memiliki kelebihan produksi, oleh karena itu

mereka harus melakukan impor bahan dan mengeksport produk, sebagian besar melalui laut, jadi negara memerlukan kekuatan angkatan laut untuk memastikan akses, melindungi jalur dagang dan jika dibutuhkan akan menjadi penyedia jalur bagi rival maupun musuh.¹⁹

Perluasan jangkauan kepentingan ekonomi melalui perdagangan dan sumber energi Tiongkok akan berbanding lurus dengan kebutuhan akan kekuatan dalam rangka pencapaian dan pengamanan kepentingan tersebut. Kebutuhan akan kekuatan ini akan dipenuhi dengan pengembangan strategi *far seas PLA Navy* dengan kelas *blue waters navy* yang saat ini tengah dibangun. Disamping itu Tiongkok merencanakan untuk membangun beberapa fasilitas pangkalan angkatan laut di negara-negara yang berada di jalur perdagangan yang dikenal dengan jalur sutra maritimnya.

¹⁸ Sanjay Chaturvedi. Samudera India, Arena Persaingan antara AS dan China dalam Hal Interlocks Pasifik dan Persaingan Regional Antara China dan India. Tabloid Diplomasi Februari 2011. <http://www.tabloiddiplomasi.org/samudera-india-arena-persaingan-antara-as-dan-china-dalam-hal-interlocks-pasifik-dan-persaingan-regional-antara-china-dan-india/> (diakses 21 Juli 2018)

¹⁹A. T Mahan dalam David C. Gompert, Sea Power and American Interest in the Western Pacific (hlm. 72) *Foreign Research Institute*, 2013.

Gambar 1. Peta Wilayah Sengketa di Laut Tiongkok Selatan



Sumber : *The Economist*, <https://www.economist.com/node/21553474/all-comments>

Integritas Teritorial dalam Masalah Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan.

Taiwan hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks bagi Tiongkok dalam konteks integritas teritorial. Taiwan merupakan pulau yang terpisah dari daratan utama telah lama menuntut kemerdekaan dari Tiongkok. Untuk mendukung upaya tersebut Taiwan mengembangkan sistem persenjataan modern dengan dukungan AS. Tiongkok dalam hal ini tidak pernah akan memberikan kemerdekaan kepada Taiwan terkait dengan kebijakan “*One Tiongkok Policy*”. Hal ini kemudian membuat Tiongkok perlu untuk mengambil sebuah tindakan untuk mencegah terjadinya kemerdekaan Taiwan. Oleh karena itu selama 15 lima belas tahun pengembangan angkatan laut Tiongkok adalah untuk memberikan efek *deterrence* pada Taiwan yang agar tidak bergerak ke arah kemerdekaan dan ternyata cara tersebut menunjukkan

keberhasilan²⁰. Disamping itu Tiongkok telah menempatkan tiga gugus tempurnya yakni *North Sea Fleet*, *East Sea Fleet* dan *South Sea Fleet* yang salah satu fokusnya adalah terkait dengan upaya mencegah lepasnya Taiwan dari Beijing.²¹

Keberadaan dari gugus tempur *PLA Navy* merupakan salah satu respon atas kekhawatiran dari keberadaan kekuatan angkatan laut AS yang seringkali melakukan manuver sebagai pesan atas dukungan AS terhadap Taiwan. Hal ini terjadi karena AS menempatkan dua gugus tempur di kawasan Asia Timur dalam rangka untuk mengamankan kepentingannya di wilayah tersebut yakni mempertahankan kebijakan atas Taiwan serta mempertahankan

²⁰ Naval Intelligence, *The People Liberation Army Navy : A Modern Navy With Chinese Characteristics* (hlm. 7)

²¹ Mahadevan Prem, *China in the Indian Ocean Part of Larger PLAN* (hlm. 3) *Center for Security Studies*. 2013.

tatanan strategis di Asia Timur.²² Bagi Tiongkok hal ini tentu saja menjadi hambatan atas upaya dalam mempertahankan Taiwan sebagai bagian dari Beijing. Disamping itu Amerika Serikat menggunakan kekuatan Angkatan Laut yang berada di kawasan Asia Timur sebagai instrumen dalam melakukan diplomasi sebagai komitmen dari kebijakan luar negeri yang dijalankan terhadap Taiwan.

Kekuatan dari *PLA Navy* yang saat ini tengah dikembangkan oleh Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari upaya negara ini dalam meningkatkan *deterrence* terhadap Amerika Serikat dan Taiwan sebagai bagian dari negara ini dalam menjalankan *coercive diplomacy*. Bagi Tiongkok, *coercive diplomacy* menjadi strategi yang harus ditempuh dalam rangka mempertahankan Taiwan sebagai bagian dari “*One Tiongkok Policy*”, karena yang dihadapi oleh Tiongkok adalah salah satu kekuatan angkatan laut terbesar di dunia saat ini. Disamping itu *PLA Navy* memainkan peranan penting dalam upaya Tiongkok untuk mempertahankan kepentingan teritorial yang saat ini berada dalam kondisi sengketa dengan beberapa negara, sengketa tersebut khususnya yang berada di wilayah lautan.

Dalam perkembangan selanjutnya seperti yang terlihat pada gambar 1, permasalahan teritorial yang harus dihadapi oleh Tiongkok adalah sengketa dengan empat negara terkait dengan klaim negara tersebut di wilayah Laut Tiongkok Selatan yakni di Kepulauan Spratley dan Paracel.

Sengketa yang terjadi di wilayah Lautan tersebut membuat Tiongkok perlu untuk melakukan sebuah langkah yang menurut negara tersebut “defensif” untuk mempertahankannya. Langkah “defensif” tersebut dipersepsikan

dengan upaya untuk mempersiapkan PLA dalam menghadapi berbagai ancaman yang muncul dari negara lain yang juga mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut. Upaya tersebut diimplementasikan dengan memperkuat Armada Selatan dimana *PLA Navy* kemudian dilengkapi dengan kapal perusak dan fregat serta beberapa kapal selam, termasuk didalamnya dua kapal selam nuklir kelas Shang yang kemudian ditambah dengan kapal Pendarat Amphibi untuk mendukung mobilitas pasukan untuk misi serangan dari laut ke darat yang diperlukan untuk mempertahankan Kepulauan Spratley.²³

Kemampuan *PLA Navy* di wilayah Selatan didukung pula oleh armada udara yang dimilikinya dengan kepemilikan dari pesawat tempur Sukhoi 30MK2, JH-7A dan Y-8J sebagai pesawat peringatan dini. Meskipun belum menempatkan kapal induk di kawasan ini, namun daya jangkau dari armada pesawat tempur *PLA Navy* tersebut didukung oleh adanya pesawat tanker untuk melakukan pengisian bahan bakar di udara. Sehingga dapat mendukung dan beroperasi dengan cakupan wilayah Laut Tiongkok Selatan tersebut. Kondisi ini yang kemudian membuat *PLA Navy* mampu untuk mengamankan dan bahkan mempertahankan wilayah laut Tiongkok Selatan dari pihak lain yang juga mengklaim kepemilikan tersebut. Keberadaan dari Armada *PLA Navy* dengan kemampuan tempur jarak jauh tersebut memberikan kepercayaan diri yang sangat tinggi kepada Tiongkok dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

Kepercayaan diri tidak dapat dilepaskan pula dari kekuatan maritim negara-negara yang bersengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang saat ini masih berada dibawah kekuatan maritim Tiongkok. Hal ini membuat Tiongkok senantiasa melakukan strategi *deterrence* untuk

²² Robert S. Ross, The 1995-1996 Taiwan Strait Confrontation : Corecion, Credibility and the Use of Force, *International Security*, 25. No.2. 90. 2000.

²³ Felix K Chang, China Naval Rise and the South China Sea : An Operational Assesment (hlm. 23) *Foreign Research Institute*. 2011.

mengukuhkan dominasi negaranya dikawasan yang dipersengketakan tersebut. Kepercayaan diri yang tinggi dari Tiongkok dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan ditunjukkan dengan pembangunan fasilitas eksplorasi minyak di Laut Tiongkok Selatan. Padahal hal ini tentu saja akan sangat beresiko untuk meningkatkan eskalasi ketegangan bahkan konflik terbuka dengan negara-negara yang bersama-sama mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut. Namun hal ini tidak membuat Tiongkok gentar, bahkan dengan tegas pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang menantang secara terbuka pihak-pihak yang menentang keberadaan fasilitas eksplorasi minyak tersebut.

Fakta lain mengenai kepercayaan diri tinggi dari Tiongkok dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan adalah saat Vietnam dan AS melakukan latihan di wilayah ini dengan menggunakan peluru tajam, hal ini kemudian di balas oleh Tiongkok dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya dengan latihan perang juga. Reaksi yang ditunjukkan oleh Tiongkok secara eksplisit merupakan sebuah langkah untuk menegaskan identitas negara tersebut sebagai negara maritim yang tidak ingin kalah dengan kekuatan maritim negara lain. Khususnya terkait dengan konflik yang dimilikinya di wilayah lautan dimana hal tersebut merupakan kepentingan yang harus diamankan oleh sebuah negara dengan identitas sebagai negara maritim seperti halnya yang saat ini tengah dicoba untuk dibangun kembali dan diperkuat oleh Tiongkok.

Klaim Tiongkok terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan semakin menguat seiring dengan pembangunan/ reklamasi terhadap gugusan karang di wilayah tersebut. Beberapa negara menyatakan bahwa reklamasi tersebut ditujukan untuk membangun fasilitas militer dalam rangka mendukung mobilitas dari angkatan bersenjata Tiongkok di wilayah tersebut. Meskipun Tiongkok berargumen bahwa

reklamasi tersebut dimaksudkan dalam rangka pembangunan mercusuar untuk kepentingan pelayaran internasional, namun hal ini memiliki makna bahwa Tiongkok tetap ingin memainkan peranan besar di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Peranan ini hanya mungkin dapat dijalankan dengan dukungan dari kekuatan angkatan laut yang memadai. Kepercayaan diri Tiongkok atas kekuatan angkatan laut yang dimiliki terlihat dari pernyataan keras terhadap manuver kapal perang AS di sekitar pulau tersebut sebagai sebuah provokasi.

Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya Tiongkok sebagai salah satu negara dengan kekuatan maritim besar dengan modernisasi yang dilakukan terhadap *PLA Navy* merupakan sebuah implementasi dari upaya negara tersebut dalam mengubah orientasi kontinental demi membangun dan memperkuat kembali identitas maritimnya. Perubahan dalam identitas Tiongkok sebagai sebuah negara tentu saja akan bermuara kepada terbentuknya kepentingan yang dalam perkembangannya harus dicapai oleh Tiongkok, kepentingan tersebut diantaranya adalah mengimbangi hegemoni AS di Pasifik, kebutuhan akan sumber energi dan integritas teritorialnya. Kepentingan-kepentingan tersebut hanya mampu dicapai dengan penguatan kembali identitas maritim yang sebenarnya dahulu pernah dimiliki oleh Tiongkok yang berkonsekuensi kepada upaya dari negara tersebut dalam membangun kekuatan serta mengembangkan doktrin maritimnya.

Pembangunan kekuatan maritim Tiongkok tercermin dari peningkatan kapabilitas *PLA Navy* dengan akuisisi berbagai persenjataan yang mampu mendukung dan memperkuat identitas kemaritiman Tiongkok seperti keberadaan dari Kapal Induk serta berbagai pendukungnya yang saat ini berada di jajaran *PLA Navy*. Penguatan identitas maritim ini akan

membuat Tiongkok memiliki “*force projection*” yang lebih luas demi mengamankan kepentingan-kepentingannya dibandingkan dengan tetap bertahan dengan identitas kontinentalnya. Apa yang dilakukan oleh Tiongkok dengan pembangunan kekuatan dari *PLA Navy* merupakan sebuah komitmen dari sebuah negara terhadap identitas yang dimilikinya serta upaya nyata dalam mencapai kepentingan yang muncul terkait dengan identitas yang dimilikinya tersebut. Dalam hal ini perlu kiranya negara yang memiliki sebuah identitas kemaritiman berkomitmen dalam upaya mencapai kepentingan-kepentingan yang muncul sebagai konsekuensi atas identitas yang dimiliki tersebut.

Daftar Pustaka

- Bitzinger, Richard A. dan Mitchell, Paul T. (2011). Tiongkok New Aircraft Carrier: Shape of Things to Come? *No.74, 6*
- Chang, Felix K. (2010). Making Waves: Debates Behind Tiongkok’s First Aircraft Carrier. *Foreign Policy Research Institute*.
- Chang, Felix K. (2011). Tiongkok’s Naval Rise and The South Tiongkok Sea : An Operational Assesment. *Foreign Research Institute*.
- Chaturvedi, Sanjay. (2011). *Samudera India, Arena Persaingan Antara AS dan Tiongkok Dalam Hal Interlocks Pasifik dan Persaingan Regional Antara Tiongkok dan India*. <http://www.tabloiddiplomasi.org/samudera-india-arena-persaingan-antara-as-dan-china-dalam-hal-interlocks-pasifik-dan-persaingan-regional-antara-china-dan-india/>
- Dewan, Sandeep. (2013). *Tiongkok’s Maritime Ambitions and the PLA Navy*. New Delhi : Vij Books.
- Ding, Arthur S. (2005). Tiongkok’s Energy Security Demands and the East Tiongkok Sea: A Growing Likelihood of Conflict in East Asia? *The Tiongkok and Eurasia Forum Quarterly 3, 3, 35-38*.
- Gompert, David C. (2013). *Sea Power and American Interest in the Western Pacific*. CA : RAND Corporation.
- Grove, Eric. (2006). *Sea Power in the Asia-Pacific Region, dalam Lawrence dalam Prabhakar W., et.al. (eds). The Evolving Maritime Balance of Power in the Asia Pacific*, Singapura : Institute of Defence and Strategic Studies.
- Li, Na. (2009).The Evaluation of Tiongkok’s Naval Strategy and Capabilities : From “Near Coast” and “Near Seas” to “Far Seas”. *Asian Security 5, 2, 144-169*.
- Lin, Kun-Chin dan Gertner, Andres Villar. (2015). *Maritime Security in the Asia Pacific : Tiongkok and the Emerging Order in the East and South Tiongkok Seas*” London : Chatam House.
- Lisbet. (2012) Peningkatan Kekuatan Militer Tiongkok. *Info Singkat Hubungan Internasional, Maret I, 05, 5-8*.
- Mahadevan, Prem. (2014). *Tiongkok in the Indian Ocean Part of Larger PLAN*. Zurich : Center for Security Studies.

McVadon, Eric A. (2011). *The PLA Navy as an Instrument of Statescraft*, dalam Philip C. et.al. (eds) *The Chinese Navy : Expanding Capabilities, Evolving Roles*, National Washington DC : Defense University Press .

Power Politics. *International Organization, Spring 46, 2, 391-425.*

Nainggolan, Poltak Partogi. (2012). Perkembangan Strategi Militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. *Info Singkat Hubungan Internasional, Januari IV, 02, 5-8.*

Naval Intelligence. (2009). *The People Liberation Army Navy : A Modern Navy With Chinese Characteristics*, Suitland: The Office of Naval Intelligence.

O'Rourke, Ronald, (2012). *Tiongkok Naval Modernization : Implication for U.S Navy Capabilities-Background and Issues for Congress*. Washington DC : Congres Research Service.

Purwanto, Adi Joko. (2010). Peningkatan Anggaran Militer Tiongkok dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur. *Spektrum 7, 1, 1-14.*

Ross, Robert S. (2000). The 1995-1196 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, Credibility and the Use of Force. *Intenational Security 25, 2, 87 -123.*

Sutter, Robert G, et.al. (2013). *Balancing Acts : The US Rebalance and Asia-Pacific Stability*, Washington DC: George Washington University.

Wendt, Alexander (1992). Anarchy is What States Make of It: Social Construct of